

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA
PADANG PANJANG 2018



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG
AGUSTUS 2018



WALIKOTA PADANG PANJANG

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 050/ /WAKO-PP/2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang :**
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Padang Panjang, perlu adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyusunan KUA PPAS Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Lembar Ketiga : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 050/ /WAKO-PP/2018
Tanggal : 2018

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019.**

KESATU : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019.

KEDUA : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019 yang dimulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Lembar Keempat : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 050/ /WAKO-PP/2018
Tanggal : 2018

- KETIGA** : RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan cuan bagi seluruh pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyusunan program dan kegiatan; dan dalam penyusunan KUA PPAS Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019
- KEEMPAT** : Sub unit pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam merencanakan program dan kegiatan tahun 2019, mengacu pada Dokumen RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019.
- KELIMA** : RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang)
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Program dan Kegiatan
- BAB IV PENUTUP

Lembar Kelima : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 050/ /WAKO-PP/2018
Tanggal : 2018

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang Panjang;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah - langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama - sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tetacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan dukungan pembiayaan dari APBD dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah:

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Adapun realisasi program/kegiatan yang tidak mencapai target, memenuhi target dan melebihi target adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 1. Dari semua kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2017 sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak terlaksana yaitu : penanganan aksi unjuk rasa.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan
 1. Dari 29 kegiatan yang ada semuanya memenuhi target kecuali penanganan kegiatan unjuk rasa.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target hasil/keluaran yang direncanakan.
 1. Kegiatan yang melebihi target adalah kegiatan penanganan penanggulangan kebakaran.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
 1. Kegiatan penanganan unjuk rasa tidak terlaksana karena memang kegiatan ini sangat tergantung kepada terjadinya unjuk rasa, dan pada tahun 2017 ini tidak ada kegiatan unjuk rasa di Padang Panjang.

3. Sedangkan kegiatan yang melebihi target yaitu penanganan dan penanggulangan kebakaran, kegiatan ini merupakan pembantuan dari Pemadam Kebakaran Padang Panjang pada kejadian kebakaran baik yang ada di dalam wilayah Kota Padang Panjang maupun di luar Kota Padang Panjang.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah terhadap kegiatan yang tidak terlaksanakan yaitu kegiatan unjuk rasa memang sangat tergantung kepada terjadinya unjuk rasa, akan semakin baik bagi daerah apabila tidak terjadi unjuk rasa dan demnstrasi.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan panganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.
 1. Perencanaan anggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tetap menyediakan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dan melebihi target tersebut.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019, memperhatikan beberapa unsur pokok berikut ini :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017-2018 .
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2018 tergambar dalam Tabel 2.1.

TABEL 2.1
REKAPTULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018 (tahun berjalan)*
KOTA PADANG PANJANG

NAMA OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMI KEBAKARAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun ...	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib; Bidang: Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri									
I	Program : Pemeliharaan Trantibmas Pencegahan Tindakan Kriminal									
1	Kegiatan : Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Penindakan pelanggaran perda di kota padang panjang	350 kali keg	171 kali keg	12 kali keg	12 kali keg	100%	24 kali keg	207 kali keg	59,00%
2	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/Polri dan kejaksaan	Meningkatnya kesadaran hukum di tengah masyarakat	250 kali keg	130 kali keg	-	-	-	-	130 kali keg	52,00%
3	Pengamanan PILPRES dan Pemilu Legislatif serta Pilkada Gubernur/Wakil dan Wali Kota	Terlaksananya pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gub	100 kali keg	60 kali keg	-	-	-	-	60 kali keg	60,00%
4	Operasi tim gabungan penegakan perda	Menurunya jumlah pelanggaran perda terhadap pekat	180 kali keg	160 kali keg	-	-	-	-	160 kali keg	89,00%
5	Peningkatan SDM PPNS dan Satpol PP	Terlaksananya Bimtek PPNS	150 orang	90 orang	-	-	-	-	90 orang	60,00%
6	Penyelenggaraan rekrutmen Tenaga Pemula	Terlaksananya Rekrutmen Tenaga Pemula	250 orang	80 orang	-	-	-	-	80 orang	32,00%

II	Program : Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)													
1	Kegiatan : Bimbingan dan penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat	300 orang	160 orang	-	-	-	-	-	-	160 orang		160 orang	53,00%
2	Kegiatan : Sosialisasi Perda Bagi Siswa Siswi Sekolah	Sosialisasi Perda Bagi Siswa Siswi Sekolah	60 Sekolah	61 Sekolah	-	-	-	-	-	-	61 Sekolah		61 Sekolah	102%
3	Kegiatan : Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	Sosialisasi dan penyuluhan akan bahaya penggunaan narkoba	5000 orang	3200 orang	1000 orang	1000 orang	100%	-	-	-	4200 orang		4200 orang	84%
4	Kegiatan : Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi warga binaan	Sosialisasi dan penyuluhan akan bahaya penggunaan narkoba bagi warga binaan	450 orang	254 orang	-	-	-	-	-	-	254 orang		254 orang	56%
III	Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan													
1	Kegiatan : Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan	hukum ditegak masyarakat terhadap pekat	400 kali keg	218 kali	80 kali keg	80 kali keg	100%	50 kali keg	348 kali	87,00%			348 kali	87,00%
2	Kegiatan : Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya jasa tenaga kontrak Banpol.PP	250 orang	140 orang	80 orang	80 orang	100%	80 orang	300 orang	120%			300 orang	120%
IV	Program : Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan													
1	Kegiatan : Pembentukan Satlmas dan Pelatihan Untuk Pengamanan Pemilu	Tersedianya tenaga linmas untuk pemilu	720 orang	604 orang	-	-	-	-	604 orang	84%			604 orang	84%
2	Kegiatan : Pengadaan sarana dan kelengkapan Pos siskamling		16 pos	16 pos	-	-	-	-	16 pos	100%			16 pos	100%
3	Kegiatan : Pelatihan petugas Siskamling		460 orang	130 orang	-	-	-	-	130 orang	28,00%			130 orang	28,00%

V	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Tersedianya bimbingan teknis bagi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%		
	Kegiatan : Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya aparatur Satpol PP yang handal	250 orang	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	40%	
VI	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
1	Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya mobil operasional lapangan	2 unit kendaraan dinas	12 unit kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	110%
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%		
3	Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya perbaikan peralatan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Nyamannya suasana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
VII	Program : Peningkatan disiplin aparatur												
1	Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian sipil harian pegawai	405 stel	412 stel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	412 stel	102,00%	
2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	405 stel	412 stel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	412 stel	102,00%	

2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunannya laporan keuangan semesteran	100%	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	100%
3	Penyusunan pelaporan pronognis realisasi anggaran	Tersusunannya laporan prognosis anggaran	100%	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	100%
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunannya laporan keuangan tahunan	100%	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak dapat bertindak secara sendiri karena berkaitan dengan organisasi lainnya baik swasta/lembaga lainnya. Untuk itu dalam penyelenggaraan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan pembinaan masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta penanggulangan kebakaran diantaranya melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan secara terus menerus, dalam upaya pemeliharaan trantibum dan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tindakan di lapangan berserta aparat kepolisian, kejaksaan, TNI dan instansi terkait lainnya baik berupa operasi yustisi, patroli, pengawasan, monitoring serta operasi penertiban.

Capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan tergambar pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun (Thn n-2)	Tahun (Thn n-1)	Tahun (Thn n)	Tahun (Thn n+1)	Tahun (Thn n-2)	Tahun (Thn n-1)	Tahun (Thn n)	Tahun (Thn n+1)	Tahun (Thn n)	Tahun (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(18)	(19)	(20)		
1	Tersedianya jumlah aparatur Satpol PP yang memahami Peraturan-peraturan				40	40	40	50	50	50	-	-	151		
2	Tersedianya jumlah aparatur PPNS yang memahami Peraturan-peraturan				40	40	40	6	6	6	-	-	30		
3	Jumlah masyarakat yang mengetahui bahaya Narkotika dan obat-obat terlarang.				1000	1000	1000	1000	1200	-	-	-	-		
4	Jumlah warga binaan yang sadar tentang bahaya Narkotika dan obat-obat terlarang.				90	90	90	90	74	-	-	-	-		
5	Jumlah masyarakat yang memahami Perda				60	60	60	60	40	-	-	-	60		
6	Terlaksananya sosialisasi Perda bagi siswa-siswi sekolah				12	12	12	1400	34	-	-	-	20		
7	Jumlah petugas siskamling yang ikut siskamling				40	300	40	0	80	60	-	-	50		
8	Jumlah tenaga Satlinmas pemilu				-	-	-	290	80	-	-	-	320		
9	Jumlah tenaga satlinmas yang terlatih dan terampil				816	816	816	290	-	-	60	80	80		
10	Terlaksananya patroli dan pengamanan Wilayah Kota Padang Panjang				80	80	80	80	80	50	50	50	50		
11	Jumlah tenaga Banpol.PP yang tersedia untuk melaksanakan patroli dan pengamanan				60	60	60	60	79	79	80	80	80		
12	Terlaksananya pengamanan pemilu				60	60	60	60	40	-	-	-	320		
13	Jumlah operasi gabungan tim Unit Kecil Lengkap (UKL) yang dilakukan dengan instansi terkait				70	70	70	70	56	12	12	24	24		
14	Pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri serta Poskotis				50	50	50	50	50	50	-	-	-		
15	Jumlah operasi gabungan penegakkan Perda				20	20	20	20	20	50	-	-	20		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran. Dalam pelaksanaannya terdapat isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian, isu-isu strategis yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

1. Penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus menjadi perhatian khusus, karena perda dan perkada adalah landasan yang menjadi titik tolak Polisi Pamong Praja menentukan arah bertindak. Konsistensi aparat penegak hukum adalah cerminan wibawa, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah adalah ujung tombaknya bagaimana Polisi Pamong Praja menegakkan aturan kepada masyarakat jika aturannya tidak tegas dan konsisten;
2. Muara dari penegakan perda adalah dijatuhkannya sanksi kepada pelanggar perda, jika tidak ada penjatuhan sanksi, tidak ada efek jera dan selalu terjadi pengulangan-pengulangan pelanggaran maka perda tersebut dianggap mandul, setidaknya seperti itulah masyarakat memberi penilaian terhadap penegakan perda. Dalam kenyataannya prosedur penegakan perda oleh polisi pamong praja sangat kompleks, diawali dengan tindakan persuasif, surat peringatan, terakhir tindakan yustisi yang bermuara kepada penjatuhan sanksi melalui proses pengadilan. Prosedur yang terakhir inilah yang sesungguhnya diinginkan masyarakat diberlakukan terhadap pelanggar perda namun untuk melanjutkan perkara pelanggaran perda ke pengadilan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, KUHAP mengatur demikian, yang berwenang melanjutkan perkara ke tingkat yustisi hanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, ditengah tingginya ekspektasi masyarakat, PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang bergerak dengan penuh keterbatasan, mulai dari keterbatasan anggaran, pendidikan dan latihan hingga keterbatasan jumlah. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dan pembenahan struktur dan kedudukan pejabat PPNS di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang umumnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran khususnya;

3. Letak geografis Kota Padang Panjang yang berada diperlintasan didukung dengan potensi wisata yang ada di Kota Padang Panjang ditambah lagi dengan pembangunan pasar pusat, *Islamic Center* dan mega proyek lainnya meningkatkan geliat perekonomian masyarakat disertai bertambahnya jumlah pengunjung ke Kota Padang Panjang berbanding lurus dengan potensi pelanggaran perda dan trantibum. Lokasi Kota Padang Panjang yang strategis membuat masyarakat Padang Panjang semakin heterogen begitu juga dengan perilaku masyarakat akan semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapsiagaan personil dan peningkatan intensitas patroli didukung dengan armada yang siap tempur.
4. Perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Satlinmas beranggotakan warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat. Tugas berat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah bagaimana membina warga masyarakat agar bersedia sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan, mengingat tahun ini adalah perdananya Satlinmas dibentuk di Kota Padang Panjang dan merintis sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
5. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), merupakan salah satu indikator pada standar pelayanan minimal. Kepadatan dan kerapatan rumah penduduk dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK, walaupun jarak tempuh tergolong dekat. Kepadatan arus lalu lintas pada waktu dan titik tertentu juga dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK. Oleh karena itu diperlukan pemetaan wilayah berdasarkan potensi bahaya kebakaran yang dipengaruhi juga oleh kepadatan penduduk selain itu penetapan jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui mobil pemadam kebakaran juga perlu disiapkan begitu juga dengan lokasi evakuasi. Namun yang utama sekali adalah bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat mengedukasi

masyarakat agar dapat mencegah bahaya kebakaran karena mencegah lebih baik dari pada memadamkan;

6. Dukungan peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan memenuhi syarat akan sangat berpengaruh kepada tingkat keberhasilan upaya pemadaman dan sekaligus mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja bagi petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas dalam proses pemadaman.
7. Mobil Pemadam Kebakaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penanggulangan kebakaran. Mobil damkar harus selalu dalam kondisi *fit* dan *stand by*, selain itu peralatan pendukung penanggulangan kebakaran juga tak kalah penting. Peralatan pendukung penanggulangan kebakaran sangat kompleks termasuk peralatan keamanan petugas pemadam kebakaran sendiri, oleh karena itu sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran tidak boleh luput dari perhatian.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (hasil Musrenbang)

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan baik dari atas kebawah (Top-down) atau dari bawah ke atas (Bottom-up). Menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, ada satu tahapan yaitu pelaksanaan musrenbang. Baik Musrenbang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Musrenbang Desa/Kelurahan.

Dari hasil Musrenbang Tahun 2018 terdapat beberapa usulan dari kelurahan yang akan menjadi perhatian pada tahun 2019 yang akan datang.

Usulan program/kegiatan hasil Musrenbang tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2018
Kota Padang Panjang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Kel. Balai-Balai, Kel Kampung Manggis, Kel Pasar Usang, Kel Tanah Pak Lambik	pengadaan bungker air	7 Unit	Pembuatan Bak Penyimpanan Air (Bunker)
2	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Kel. Balai-Balai, Kel Pasar Usang	Pengadaan Hydran	4 unit	Pembuatan Hydran
3					
4					
5					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.2.1 Tujuan

Sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada Renja 2019 ini adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya kondisi lingkungan yang kondusif di Kota Padang Panjang.”

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan pemahaman perda dan trantibmum
2. Cakupan petugas perlindungan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas penanganan bencana kebakaran

3.2.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

- Ketentraman dan ketertiban umum
- Perlindungan terhadap masyarakat

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :

1. Jumlah Program dan kegiatan :

Adapun jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebanyak 8 program dan sebanyak 31 kegiatan

2. Penyebaran lokasi program dan kegiatan :

Semua program dan kegiatan tersebut berada dilingkungan wilayah kota Padang Panjang

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya (APBD/APBN)

- c. Penjelasan jika rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD : sesuai.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sbb. :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Padang Panjang

NAMA PERANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.01.1.01.05.01.01	1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Persetase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	4	90%	1.775.000.000	APBD		10	3.434.247.000
1.01.1.01.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian materi, jumlah paket yang dikirimkan	Padang Panjang	1 tahun	5.500.000	APBD		1 tahun	6.000.000
1.01.1.01.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	Padang Panjang	36 rekening	65.000.000	APBD		36 rekening	72.000.000
1.01.1.01.05.01.01.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas dan Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Padang Panjang	1 tahun	400.000.000	APBD		6 Unit roda 6, 5 unit roda 4, 5 unit roda 2, 10 unit sepeda	428.592.000
1.01.1.01.05.01.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan yang tersedia	Padang Panjang	2 orang	70.000.000	APBD		2 orang	100.000.000
1.01.1.01.05.01.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Padang Panjang	30 jenis	9.000.000	APBD		1 tahun	40.040.000
1.01.1.01.05.01.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah fotocopy yang disediakan	Padang Panjang	1 tahun	20.000.000	APBD		1 tahun	14.690.000
1.01.1.01.05.01.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	Padang Panjang	1 tahun	22.000.000	APBD		1 tahun	24.900.000
1.01.1.01.05.01.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	Padang Panjang	1 tahun	585.500.000	APBD		1 tahun	2.118.025.000
1.01.1.01.05.01.01.10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar daerah	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Padang Panjang	1 tahun	300.000.000	APBD		1 tahun	300.000.000
1.01.1.01.05.01.01.11	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis perkantoran	Jumlah pembayaran honorarium pegawai honoror	Padang Panjang	9 orang	300.000.000	APBD		9 orang	310.000.000
1.01.1.01.05.01.01.12	2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Padang Panjang	90%	65.000.000	APBD		1 unit	223.000.000
1.01.1.01.05.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yg dipelihara secara berkala	Padang Panjang	1 tahun	45.000.000	APBD		1 tahun	198.000.000
1.01.1.01.05.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yg dipelihara secara berkala	Padang Panjang	1 tahun	20.000.000	APBD		1 tahun	25.000.000
1.01.1.01.05.01.03	3. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek	Padang Panjang	1 tahun	50.000.000	APBD		1 tahun	110.000.000
1.01.1.01.05.01.06	4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Padang Panjang	100%	1.120.000	APBD		100%	1.120.000
1.01.1.01.05.01.06.02	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja keuangan dan likhisar realisasi kinerja keuangan OPD, laporan keuangan semester, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	Padang Panjang	12 laporan	770.000	APBD		12 laporan	770.000
1.01.1.01.05.01.06.02	Penyusunan Perencanaan dan laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, laporan capaian kinerja dan likhisar realisasi kinerja OPD, RENCANA, LKJP, LKPP, SPP, Perencanaan kinerja	Padang Panjang	8 laporan	350.000	APBD		8 laporan	350.000
1.01.1.01.05.01.16	5. Program : Pemeliharaan Keaktifan dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan : Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Persentase tingkat pelanggaran perda yang ditangani	Padang Panjang	100%	4.416.140.000			100%	5.927.396.000
1.01.1.01.05.01.16.03	Pengamanan Pemilu Legislatif/pilpres/Subernur/pilkada	Jumlah operasi gabungan dalam mencegah tindak kejahatan	Padang Panjang	12 kali	77.000.000	APBD		62 kali	85.000.000
1.01.1.01.05.01.16.07	Pengamanan terhadap aksi- aksi demonstrasi dan unjuk rasa	Jumlah pengamanan pilpres/pilpres/Subernur/pilkada	Padang Panjang	40 kali	100.000.000	APBD		40 kali	185.000.000
1.01.1.01.05.01.16.01	Pembinaan dan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Padang Panjang	5 kali pamy/	20.000.000	APBD		5 kali pamy/	20.000.000
1.01.1.01.05.01.16.01	Penjajapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah tenaga kontrak Bantol PP dan damkar yang dilaijkan	Padang Panjang	100 orang	80.000.000	APBD		100 orang	142.806.000
1.01.1.01.05.01.16.02	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya operasi pengamanan Perda	Padang Panjang	75 kali	280.000.000	APBD		75 kali	285.000.000

1.01.1.01.05.01.19	7. Program : Pembedayaan Masyarakat Untuk Mengaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan :	Cakupan pabugas linmas	0,35%	448.060.000	194 orang	448.170.000
1.01.1.01.05.01.19.04	Pembentukan dan Pelatihan Satuan Linmas Kota Padang Panjang	Jumlah Sarlimas yang dibentuk dan mengikuti pelatihan	250 orang	410.000.000	80 orang	285.000.000
1.01.1.01.05.01.19.06	Peningkatan HUT Sampo, PP, Linmas, dan Damkar tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Padang Panjang	Jumlah perayaan HUT Sampo, PP, Damkar, TNI nasional, Provinsi, dan Kota yang dilaksanakan dan diikuti	3 kali	38.060.000	3 kali	163.170.000
1.01.1.01.05.01.19	8. Program: Peningkatan kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persepsi jumlah bencana yang tertangani	100%	2.053.440.000		8.022.700.000
1.01.1.01.05.01.19.03	Melaksanakan Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Tersedianya peralatan penunjang penanggulangan kebakaran		1.494.400.000		5.192.200.000
		honorarium	4 unit	-	7 unit	-
		Pengadaan bunker air	-	-	8 unit	-
		Pengadaan bak kontrol pemadam	-	-	4 unit	-
		Pengadaan hydrant keiring	40 set	-	40 set	-
		balok tahanan panas	40 bh	-	40 bh	-
		harvik boot	40 pasang	-	40 pasang	-
		Serung tangan isolir	10 set	-	10 set	-
		Slang Fir Nozzle 1,5 inch	10 set	-	2 set	-
		Slang Fir Nozzle 2,5 inch	2 set	-	4 set	-
		Slang hisap 6 inch	4 set	-	4 set	-
		Slang hisap 4 inch	4 set	-	40 bh	-
		Slang hisap 3 inch	40 bh	-	5 bh	-
		Helim Fire Man MSA	5 bh	-	1 bh	-
		Breathing apparatus (BA)	1 bh	-	1 bh	-
		Mesin pengisi BA	1 bh	-	2 bh	-
		Cahin saw besar	2 bh	-	20 hh	-
		Cahin saw kecil	20 bh	-	1 unit	-
		Tabung racun api powder	1 unit	-	2 unit	-
		Combi tool	2 unit	-	2 unit	-
		Air lifting jack	2 unit	-	40 bh	-
		Mesin portabel V 85 (B)	1 set	-	1 set	-
		Mesin portabel V 20 ES (K)	40 bh	-	10 unit	-
		Masker full face	1 set	-	2 unit	-
		Sound system	10 unit	-	1 unit	-
		Nozel pistol grip 1,5 inch	2 unit	-	1 set	-
		Mesin floating fire pump	1 unit	-	1 set	-
		Cut Off Shaw	1 set	-	1 set	-
		Rotary lamp (set)	1 set	-	1 set	-
		Repeater (set)	1 set	-	1 set	-
		Radio komunikasi high (set)	40 unit	-	1 set	-
		Radio komunikasi (RT)	1 set	-	2 unit	-
		Tri Kid (set)	2 unit	-	1 set	-
		Dongkrak bilya 5 ton	1 set	-	1 set	-
		life jack	1 set	-	26 set	-
		Genset besar (set)	1 unit	-	1 unit	-
		Genset kecil (set)	26 set	-	1 unit	-
		Kasur (Set)	1 unit	-	1 unit	-
		Mesin cuci	1 unit	-	1 unit	-
		Loker (gajangan pakaian)	40 unit	-	2 set	-
		Sepatu operasional	2 set	-	3 unit	-
		Peralatan K3 (Set)	3 unit	-	1 unit	-
		Baju safety evakuasi lebah	3 unit	-	1 set	-
		SHK penangkap ulir	1 unit	-	1 set	-
		Meja 1 Biru	1 set	-	1 unit	-
		Kursi Tarun (set)	1 set	-	1 unit	-
		Kamera + Tele	1 unit	-	1 unit	-
		Laptop	1 unit	-	40 unit	-
		Infocus	40 unit	-	100 kali	457.500.000
		Wear pack nomex	100 kali	380.000.000	APBD	
		Jumlah kebakaran yang ditangani			50 org/1h	2.373.000.000
1.01.1.01.05.01.19.12	Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah tenaga kontrak pemadam kebakaran yang disiapkan	6 org/1h	179.040.000	APBD	
1.01.1.01.05.01.19.14	Penyediaan jasa tenaga balaker penanggulangan kebakaran	Jumlah tenaga kontrak pemadam kebakaran yang disiapkan		8.808.780.000		18.146.545.000
		Jumlah P1				

PRIORITAS MEDIA :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maja Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	TARGET CAPAIAN KINERJA
1.01.1.01.05.01.02	1. Program : <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i> Kegiatan : Pengadaan tanah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya lahan untuk gedung Sispol Pp dan Damkar		4850 M2	203.810.000	APBD		
1.01.1.01.05.01.02.12		Meningkatnya disiplin aparatur		90%	73.000.000		90%	209.600.000
1.01.1.01.05.01.03	2. Program : <i>Peningkatan Disiplin Aparatur</i> Kegiatan : Pengadaan Pakelias Dinas Harian (PDH) dan Perengkapannya	Tersedianya pakelias dinas beserta perlengkapannya (PDH,PSH, PSL, PDU, Baki	Padang Panjang	4 stel	6.000.000	APBD	70 stel	43.050.000
1.01.1.01.05.01.03.02		Tersedianya pakelias dinas beserta perlengkapannya	Padang Panjang	60 stel	45.000.000	APBD	60 stel	93.000.000
1.01.1.01.05.01.03.03		Tersedianya pakelias khusus hari-hari tertentu	Padang Panjang	40 stel	22.000.000		40 stel	73.550.000
1.01.1.01.05.01.04.05		Pengadaan pakelias khusus hari-hari tertentu		80 Orang, 40 kali	110.000.000	APBD	80 orang, 40 kali	70.000.000
1.01.1.01.05.01.19	3. Program <i>peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</i>	Persentase jumlah bencana yang tertangani Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan anak2 Taman Kanak-kanak	Padang Panjang	80 Orang, 40 kali	386.810.000			275.600.000

Padang Panjang, 30 Agustus 2018
KEPALA SATUAN POLISI PANGKONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

ARIES-REAGUS-503
Pembina Tr. I / NIP. 19651112198602 1 002

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2019 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
10. Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknis perkantoran;

II. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
3. pengadaan tanah.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan.

IV. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan kinerja keuangan Perangkat Daerah;
2. Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah;

V. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, didukung dengan kegiatan, yaitu:

1. Pengamanan pemilu legislatif/pilpres;
2. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
3. Pengamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi dan unjuk rasa;
4. Pembinaan dan penyuluhan penyakit masyarakat;
5. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan;
6. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

VI. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan dan pelatihan Satuan Linmas;
2. Peringatan HUT Satpol. PP, Linmas dan Damkar tingkat Nasional, Provinsi dan Kota.

VII. Program Peningkatan disiplin aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
2. Pengadaan pakaian kerja lapangan;
3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

VIII. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran;
2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;
3. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran;
4. Penyediaan jasa tenaga balakar penanggulangan kebakaran.

**SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019	Program/Kegiatan OPD	Kinerja		
			Indikator Program	Target	
1	Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih	I Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1 Pengamanan pemilu legislatif/pilpres. 2 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan. 3 Pengamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi dan unjuk rasa.	Tingkat kriminalitas		
			Jumlah pengamanan pemilu legislatif/pilpres	30 kali	
			Jumlah kasus yang tertangani	200 kasus	
		II Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1 Pembinaan dan penyuluhan penyakit masyarakat;	Jumlah pengamanan aksi demonstrasi dan unjuk rasa	5 kali	
			Jumlah kasus yang ditangani		
			Jumlah peserta sosialisasi pekat	60 orang	
		III Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat dan pelatihan pengamanan pemilu legislatif/presiden; 2 Pengadaan pakaian dan perlengkapan personal Linmas pemilu 3 Peringatan HUT Satpol. PP dan Damkar se Sumatera Barat	Jumlah petugas linmas	270 orang	
			Jumlah petugas linmas		
			Jumlah pakaian personal linmas	270 stel	
				Jumlah pelaksanaan peringatan HUT	2 kali

**SINKRONISASI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PADA RKPD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN
PADA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

No	RKPD				RENJA PD						
	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata laksana pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	- Evaluasi SAKIP - Indeks Kepuasan Masyarakat	B Sangat Baik	Terwujudnya kondisi lingkungan yang kondusif di kota padang panjang	Persentase pengesakan perda	98%	Meningkatnya kualitas dan pemahaman perda dan trantibnum	Jumlah kasus pelanggaran perda dan trantibnum yang ditangani	200 kasus
							Cakupan pelayanan bencana kebakaran	98%	-Cakupan petugas perlindungan masyarakat	Rasio petugas linmas	Jumlah Anggota Linmas X 100% Jumlah Penduduk 0,50%
							Meningkatnya kualitas penanganan bencana kebakaran			Tingkat waktu tanggap	Jumlah laporan yg ditindak lanjuti.dlm 24 jam X 100% Jumlah Laporan yang diterima 98%

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kota Padang Panjang tahun 2019 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJM Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018–2023 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2018– 2023 (Pelaksanaan Tahun 2019) serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Padang Panjang, Agustus 2018

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**

ARKES REFAGUS, S.Sos.

Pembina TK.I/NIP.19651112 198602 1 002